

Tren pemanfaatan dan belanja obat fitofarmaka di Indonesia : Strategi meningkatkan daya saing produk herbal Indonesia

Utilization and Expenditures Trends of Phytopharmaceuticals in Indonesia: Strategic Approaches to Boost Herbal Product Competitiveness

Diara Oktania^{1*}, Dumillah Ayuningtyas², Pujiyanto³, Yeni⁴

^{1*} Master Program in Public Health, Indonesia University

^{2,3} Health Policy and Administration Department, Faculty of Public Health,

Email: diara.oktania@gmail.com

Abstrak

Pengobatan tradisional di Indonesia, yang berbasis kearifan lokal, diakui secara nasional dan internasional untuk mendukung kesehatan masyarakat secara preventif, promotif, dan kuratif, didukung oleh komitmen pemerintah melalui regulasi seperti sertifikasi jamu dan program Germas, serta kekayaan hayati ribuan spesies tanaman obat yang menjadi bahan baku industri obat tradisional signifikan bagi ekonomi nasional, dengan upaya saintifikasi untuk memastikan keamanan dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren pemanfaatan dan belanja obat fitofarmaka serta memberikan strategi alternatif untuk meningkatkan daya saing obat fitofarmaka sebagai pengobatan tradisional. Penelitian cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan data sekunder belanja obat fitofarmaka produksi dalam negeri tahun 2023–2024 dari sistem e-purchasing LKPP Kementerian Kesehatan, yang diolah dengan Microsoft Excel dan dianalisis secara deskriptif untuk distribusi frekuensi, persentase, pola, dan tren. Total belanja obat fitofarmaka mencapai Rp25,94 miliar, dengan peningkatan dari Rp11,08 miliar pada 2023 menjadi Rp14,86 miliar pada 2024; provinsi dengan belanja tertinggi adalah Jawa Tengah (Rp3,88 miliar), diikuti Jawa Barat (Rp3,02 miliar) dan Jawa Timur (Rp2,38 miliar), yang menyumbang lebih dari sepertiga total nasional, sementara produk imunomodulator seperti Stimuno mendominasi dengan Rp15,01 miliar, tetapi pemanfaatan untuk penyakit kronis masih rendah seperti hipertensi (Tensigard: Rp1,08 miliar) dan diabetes (Diabadox: Rp0,295 miliar). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun belanja dan pemanfaatan fitofarmaka menunjukkan tren positif, pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan integrasi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, ketimpangan distribusi wilayah, biaya riset yang tinggi, serta rendahnya promosi dan penerimaan di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat.

Kata kunci: Obat Fitofarmaka; Obat Tradisional; Biaya Obat; Belanja Obat; Daya Saing.

Abstract

Traditional medicine in Indonesia, rooted in local wisdom, is recognized nationally and internationally to support public health preventively, promotively, and curatively, backed by government commitments through regulations such as jamu certification and the Germas program, as well as the abundant biodiversity of thousands of medicinal plant species serving as raw materials for the significant national traditional medicine industry, with ongoing scientification efforts to ensure safety and efficacy. This study aimed to identify trends in the utilization and expenditure of phytopharmaceutical drugs and to provide alternative strategies for enhancing the competitiveness of phytopharmaceuticals as traditional medicine. A cross-sectional study with a quantitative descriptive approach utilized secondary data on domestic phytopharmaceutical drug expenditures from 2023–2024 sourced from the Ministry of Health's LKPP e-purchasing system, which was processed using Microsoft Excel and analyzed descriptively for frequency distribution, percentages, patterns, and trends. Total phytopharmaceutical expenditure reaches Rp25.94 billion, with an increase from Rp11.08 billion in 2023 to Rp14.86 billion in 2024; provinces with the highest spending include Central Java (Rp3.88 billion), followed by West Java (Rp3.02 billion) and East Java (Rp2.38 billion), which contribute more than one-third of the national total, while immunomodulator products like Stimuno dominate with Rp15.01 billion, but utilization for chronic diseases remains low, such as hypertension (Tensigard: Rp1.08 billion) and diabetes

*Corresponding Author: Diara Oktania, Universitas Indonesia, Kota Depok, Indonesia

E-mail : diara.oktania@gmail.com

Doi : 10.35451/3kbr5f29

Received : December 13, 2025. Accepted: December 30, 2026. Published: April 30, 2026

Copyright (c) 2026 : Diara Oktania. Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

(Diabadox: Rp0.295 billion). This study concludes that although phytopharmaceutical expenditure and utilization show positive trends, their utilization is not yet optimal due to limitations in integration into the National Health Insurance, regional distribution disparities, high research costs, as well as low promotion and acceptance among healthcare professionals and the public.

Keywords: *Phytopharmaceutical; Traditional Medicine; Medicine Expenditure; Cost Medicine; Competitiveness*

1. PENDAHULUAN

WHO mendefinisikan pengobatan tradisional adalah gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang didasarkan pada teori, kepercayaan, dan pengalaman yang berasal dari budaya yang berbeda, apakah dapat dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan, diagnosis, peningkatan atau pengobatan. penyakit fisik dan mental. Istilah “pengobatan komplementer” atau “pengobatan alternatif” mengacu pada serangkaian luas praktik perawatan kesehatan yang bukan bagian dari tradisi negara itu sendiri atau obat konvensional dan tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem perawatan kesehatan yang dominan. Untuk menghadapi tantangan variasi praktik dan kualitas dari pengobatan tradisional ini, yang menekankan pentingnya memperkuat jaminan kualitas T&CM dan mengintegrasikan pelayanan T&CM ke dalam pelayanan kesehatan modern, WHO mengembangkan Traditional Medicine Strategy 2014–2023 yang menekankan pentingnya basis pengetahuan ilmiah, jaminan mutu, dan integrasi pelayanan.

Berdasarkan Survei Global WHO (1994), tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan obat tradisional, yaitu kurangnya data penelitian, kurangnya mekanisme kontrol yang tepat, kurangnya pendidikan dan pelatihan, dan kurangnya keahlian. Situasi serupa juga ditemukan di wilayah SEARO, sebuah survei kebijakan nasional tentang obat tradisional dan regulasi jamu (2005) mengungkapkan bahwa belum semua negara SEARO memiliki kebijakan yang berkaitan dengan obat tradisional. Pada Deklarasi Alma Ata (1978) dunia telah berkomitmen bahwa obat tradisional harus dikembangkan secara signifikan. Negara anggota ASEAN juga menyadari pentingnya mengintegrasikan pengobatan tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional, terutama dalam pelayanan kesehatan primer, dengan memanfaatkan obat tradisional.

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bentuk pengobatan dan perawatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris. Metode ini dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi tiga jenis: empiris, komplementer, dan integrasi.[17] Data pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023 menyebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional telah dilaksanakan di 350 puskesmas, 16 rumah sakit, dan 16 Griya Sehat.[13]

Di daerah perkotaan, pemanfaatan obat tradisional juga terus berkembang. Masyarakat perkotaan mulai menyadari pentingnya menggunakan bahan alami yang lebih aman dan ramah lingkungan. Namun, penggunaan obat tradisional di daerah perkotaan seringkali terbatas oleh ketersediaan bahan baku dan pengetahuan yang memadai tentang cara pengolahan yang tepat. Pada tahun 2023, sebanyak 379 kabupaten/kota di 38 provinsi atau sekitar 73,7% terlibat dalam pembinaan kesehatan tradisional[6], sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yaitu menjadi 470 kabupaten/kota atau sekitar 91,4% yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional[14].

Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam mengembangkan obat tradisional, khususnya fitofarmaka. Sehubungan dengan upaya untuk mengintegrasikan pengobatan tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional, sejumlah kerangka regulasi telah diterbitkan, mulai dari tingkat Undang-undang, hingga Keputusan Menteri Kesehatan. Kebijakan tersebut meliputi: Formularium Fitofarmaka yang merupakan acuan untuk perencanaan dan pengadaan fitofarmaka supaya tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan serta sebagai acuan penggunaan

fitofarmaka; pengaturan praktisi pengobatan tradisional; pengaturan praktik pengobatan alternatif; dan pengembangan jamu berbasis ilmiah (saintifikasi jamu).

Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia juga terlihat dari hasil survei, di mana penggunaan pelayanan kesehatan tradisional naik dari 31,4% menjadi 32,5%, meskipun pemanfaatan ramuan jadi justru menurun dari 48% (2018) menjadi 36,9% (2023) [15][5]

Berdasarkan regulasi BPOM tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan Obat Bahan Alam Indonesia berdasarkan proses, klaim keberhasilan, dan tingkat bukti, Obat Tradisional dikategorikan menjadi tiga, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jenis obat tradisional yang dikenal masyarakat umumnya adalah jamu, sedangkan obat herbal terstandar dan fitofarmaka masih terdengar asing di Masyarakat, fitofarmaka adalah produk berbasis bahan alam yang telah terstandarisasi dan terbukti secara klinis berkhasiat dan aman. Peningkatan pemanfaatan fitofarmaka sebagai produk unggulan dalam negeri mendukung kemandirian pengobatan di Indonesia, dibuat dari bahan baku lokal, diproduksi di dalam negeri, dan memenuhi standar Indonesia. Dengan kekayaan alam dan keragaman tanaman obat sedemikian, Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang ini.

Berdasarkan data Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (RISTOJA) 2012, 2015, dan 2017 oleh Kementerian Kesehatan menyebutkan terdapat 32.013 ramuan obat tradisional dan 2.848 species tumbuhan bahan obat tradisional dengan lebih dari 350 jenis tanaman dengan potensi fitofarmaka, berlimpahnya potensi bahan baku obat tradisional dapat mendukung keberlanjutan produksi fitofarmaka namun hanya 28 jenis bahan baku yang telah disertifikasi BPOM[9]

Menurut dataset dari BPOM, di Indonesia jumlah industri yang memproduksi produk obat tradisional sebanyak 1.043 industri yang terdiri dari IOT, UMOT, UKOT dengan jumlah produk Obat Tradisional yang terdaftar sebanyak 24.747 produk[16], hal ini menunjukkan bahwa sektor industri Obat Tradisional dapat menjadi salah satu sektor penggerak pembangunan ekonomi nasional karena mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan daya saing berupa nilai tambah dan lapangan pekerjaan.

Dari kondisi diatas, analisis tren penggunaan dan belanja obat tradisional khususnya Fitofarmaka diperlukan sebagai pendukung dalam merumuskan strategi penguatan daya saing untuk menciptakan produk obat tradisional khususnya fitofarmaka yang memiliki nilai tambah ekonomi dan dapat mendorong penyediaan obat tradisional yang aman, efektif, dan berkualitas serta untuk meningkatkan utilisasi atau tingkat pemanfaatan Fitofarmaka di Pelayanan Kesehatan Tradisional dan secara luas digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

METODE

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif cross-sectional**, yang bertujuan untuk memberikan gambaran pola, tren, dan proporsi belanja obat fitofarmaka produksi dalam negeri pada seluruh provinsi di Indonesia selama periode tahun 2023–2024. Unit analisis dalam penelitian ini adalah **produk obat fitofarmaka** yang tercatat dalam sistem e-purchasing LKPP pada tahun pengamatan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tingkat nasional dengan cakupan 34 provinsi di Indonesia, menggunakan data transaksi belanja obat fitofarmaka yang tercatat di sistem e-purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengambilan data dilakukan melalui akun resmi yang diberikan oleh Digital Transformation Officer (DTO) Kementerian Kesehatan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2023–2024, dengan proses pengolahan dan analisis data dilakukan pada tahun 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data transaksi pembelian obat fitofarmaka yang tercatat dalam sistem e-purchasing LKPP pada tahun 2023–2024. Sampel penelitian meliputi seluruh transaksi pembelian produk fitofarmaka yang memenuhi kriteria, yaitu termasuk dalam kategori fitofarmaka yang memiliki nomor izin edar, tercatat pada tahun transaksi 2023 atau 2024, serta memiliki data lengkap meliputi provinsi, nama produk, nomor

izin edar, tahun transaksi, total harga, harga satuan, kuantitas, dan nilai TKDN. Teknik sampling yang digunakan adalah **total sampling**, karena seluruh data transaksi fitofarmaka yang tersedia dalam periode penelitian dijadikan sampel analisis.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari sistem e-purchasing LKPP diolah menggunakan Microsoft Excel dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Analisis meliputi perhitungan total belanja, tren pembelian, distribusi pembelanjaan per provinsi, serta identifikasi produk dan kelas terapi dengan nilai belanja terbesar. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta sebaran untuk menggambarkan pola pembelanjaan fitofarmaka secara nasional pada tahun 2023–2024.

2. HASIL

Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mencakup seluruh provinsi di Indonesia, karena penelitian ini menggunakan data transaksi pembelian obat fitofarmaka yang dilakukan melalui sistem e-purchasing LKPP pada tingkat nasional. Setiap provinsi menjadi unit wilayah analisis untuk melihat variasi belanja, distribusi penggunaan, serta tren pemanfaatan produk fitofarmaka. Dengan cakupan nasional ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola pembelanjaan fitofarmaka di berbagai wilayah, baik provinsi dengan tingkat pembelian tinggi seperti di Pulau Jawa maupun provinsi dengan pembelanjaan rendah di wilayah Indonesia Timur.

10 Provinsi dengan Belanja Obat Fitofarmaka Terbesar di Periode 2023 – 2024

Berdasarkan analisis belanja periode 2023 – 2024, seperti yang terlihat pada **Tabel 1** dari 10 provinsi dengan total belanja obat fitofarmaka terbesar, Provinsi Jawa Tengah memimpin dengan total belanja tertinggi 3,88 Milyar Rupiah diikuti provinsi Jawa Barat 3,02 Milyar Rupiah dan Jawa Timur 2,38 Milyar Rupiah, yang secara kolektif menyumbang lebih dari sepertiga total belanja nasional obat Fitofarmaka selama 2 periode.

Tabel 1. Provinsi dengan belanja Obat Fitofarmaka terbesar periode 2023-2024

No	Provinsi	Belanja Obat Fitofarmaka (Rp)		Total Belanja (Rp)	Tren Proporsi (%)		Perubahan 2023–2024 (%)
		2023	2024		2023	2024	
1	Jawa Tengah	1,121,594,234	2,761,683,160	3,883,277,394	28.88%	71.12%	59.39%
2	Jawa Barat	1,750,371,560	1,270,552,710	3,020,924,270	57.94%	42.06%	-37.76%
3	Jawa Timur	864,025,640	1,516,605,980	2,380,631,620	36.29%	63.71%	43.03%
4	Sulawesi Selatan	116,776,344	1,550,162,230	1,666,938,574	7.01%	92.99%	92.47%
5	Sumatera Utara	1,099,899,358	3,191,600	1,103,090,958	99.71%	0.29%	-34362.32%
6	Lampung	681,545,448	356,827,100	1,038,372,548	65.64%	34.36%	-91.00%
7	Sumatera Barat	–	1,022,743,400	1,022,743,400	0.00%	100.00%	100.00%
8	Bali	413,127,200	550,247,246	963,374,446	42.88%	57.12%	24.92%
9	Jambi	427,104,200	444,702,700	871,806,900	48.99%	51.01%	3.96%
10	Kalimantan Barat	403,313,000	434,185,468	837,498,468	48.16%	51.84%	7.11%

10 Obat Fitofarmaka Terbesar Berdasarkan Value di Indonesia

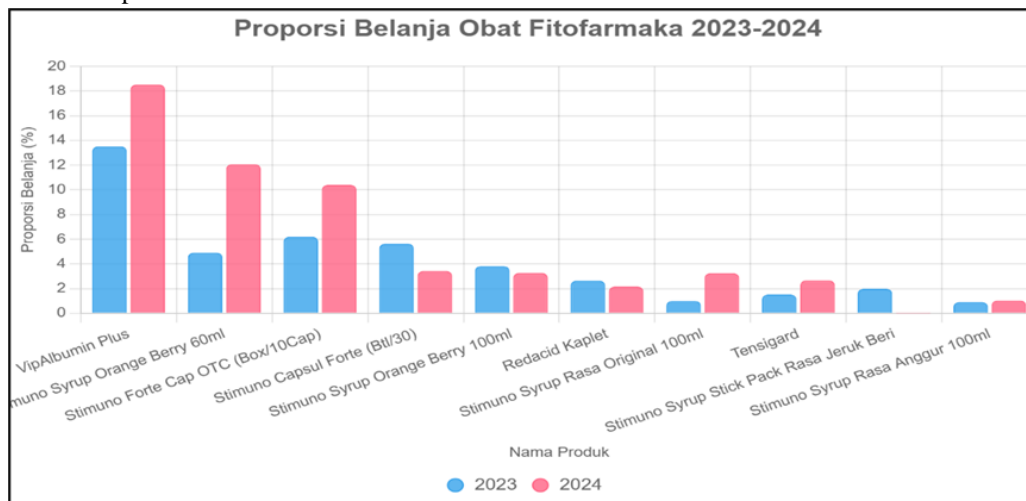
Dari analisis belanja obat Fitofarmaka di provinsi diperoleh hasil 10 jenis obat Fitofarmaka dengan belanja terbesar (*by value*) selama periode 2023 – 2024. Pada **Tabel 2** dan **Gambar 1** dapat dilihat tren yang menunjukkan perbandingan proporsi pembelian produk fitofarmaka pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2. Obat Fitofarmaka dengan belanja terbesar periode 2023-2024

No	Obat Fitofarmaka	Belanja Obat Fitofarmaka (Rp)	Total Belanja (Rp)	Tren Proporsi (%)	Perubahan 2023–2024 (%)
----	------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------------

		2023	2024		2023	2024	
1	VIPALBUMIN PLUS	3,505,416,970	4,802,531,700	8,307,948,670	13.51%	18.51%	27.01%
2	STIMUNO SYRUP ORANGE BERRY 60 ML	1,273,322,575	3,129,866,713	4,403,189,288	4.91%	12.07%	59.22%
3	STIMUNO FORTE CAPOTC (BOX/10CAP)	1,607,889,360	2,694,478,810	4,302,368,170	6.20%	10.39%	40.33%
4	STIMUNO CAPSUL FORTE (BTL30)	1,460,888,150	888,259,600	2,349,147,750	5.63%	3.42%	-64.47%
5	STIMUNO SYRUP ORANGE BERRY 100 ML	991,803,932	846,500,512	1,838,304,444	3.82%	3.26%	-17.17%
6	REDACID KAPLET	684,305,010	561,038,400	1,245,343,410	2.64%	2.16%	-21.97%
7	STIMUNO SYRUP RASA ORIGINAL 100 ML	260,061,100	841,162,901	1,101,224,001	1.00%	3.24%	69.08%
8	SENGGARD	391,374,620	690,303,820	1,081,678,440	1.51%	2.66%	43.30%
9	STIMUNO SYRUP STICK PACK RASA JERUK BERRY	514,361,016	2,527,200	516,888,216	1.98%	0.01%	-20253.00%
10	STIMUNO SYRUP RASA ANGGUR 100 ML	232,584,640	266,789,805	499,374,445	0.90%	1.03%	12.82%

Pada **Tabel 2** dapat dilihat 10 produk obat Fitofarmaka terbesar by value periode 2023 - 2024 di Indonesia yaitu Vipalalbumin Plus 8,3 Milyar Rupiah, Stimuno Syrup Orange Berry 60ml 4,4 Milyar Rupiah, Stimuno Forte Cap OTC 4,3 Milyar Rupiah, Stimuno Capsul Forte 2,3 Milyar Rupiah, Stimuno Syrup Orange Berry 100ml 1,8 Milyar Rupiah, Redacid Kaplet 1,2 Milyar Rupiah, Stimuno Syrup Rasa Original 100ml 1,1 Milyar Rupiah, Tensigard 1,08 Milyar Rupiah, Stimuno Syrup Stic Pack Rasa Jeruk Beri 516 Juta Rupiah, Stimuno Syrup Rasa Anggur 100ml 499 Juta Rupiah.



Gambar 1. Grafik Obat Fitofarmaka dengan belanja terbesar periode 2023-2024

Tren Belanja Produk Fitofarmaka Tahun 2023–2024

Hasil analisis data belanja obat fitofarmaka menunjukkan adanya fluktuasi namun cenderung meningkat pada periode 2023–2024 (Gambar 1). Peningkatan belanja terjadi pada hampir seluruh produk fitofarmaka yang dianalisis. Produk dengan pertumbuhan belanja tertinggi adalah Stimuno Syrup Rasa Original 100 ml (69,08%), Stimuno Syrup Orange Berry 60 ml (59,32%), Stimuno Forte Cap OTC (40,33%), serta Tensigard (43,30%). Produk-produk tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan fitofarmaka lainnya.

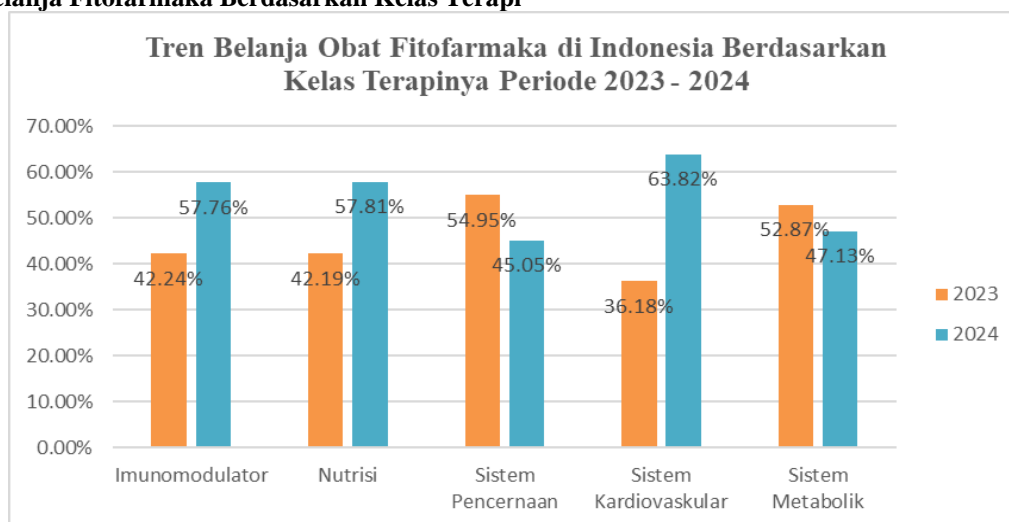
Belanja Obat Fitofarmaka Berdasarkan Kelas Terapi

Tabel 3. Belanja Obat Fitofarmaka di Indonesia Berdasarkan Kelas Terapinya Periode 2023 – 2024

No	Kelas Terapi	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Proporsi Belanja (Rp)	Proporsi (%)
1	Imunomodulator	6,340,902,773	8,669,585,541	15,010,488,314	57.86%
2	Nutrisi	3,505,416,970	4,802,531,700	8,307,948,670	32.03%
3	Sistem Pencernaan	684,305,010	561,038,400	1,245,343,410	4.80%
4	Sistem Kardiovaskular	391,374,620	690,303,820	1,081,678,440	4.17%
5	Sistem Metabolik	156,191,580	139,242,600	295,434,180	1.14%
	Grand Total	11,078,190,953	14,862,702,061	25,940,893,014	100.00%

Berdasarkan Tabel 3, proporsi belanja obat fitofarmaka selama periode 2023–2024 didominasi oleh kelas terapi imunomodulator. Total belanja fitofarmaka imunomodulator mencapai Rp15,01 miliar atau sekitar 57,86% dari total belanja fitofarmaka selama dua tahun. Sebaliknya, belanja fitofarmaka untuk indikasi penyakit kronis masih relatif rendah. Produk sistem kardiovaskular, seperti Tensigard, mencatat belanja sebesar Rp1,08 miliar (4,17%), sedangkan produk sistem metabolik, seperti Diabadex, hanya sebesar Rp295 juta (1,14%).

Tren Belanja Fitofarmaka Berdasarkan Kelas Terapi



Gambar 2. Grafik Tren Belanja Obat Fitofarmaka di Indonesia berdasarkan Kelas Terapinya Periode 2023 – 2024

Analisis tren berdasarkan kelas terapi (Gambar 2) menunjukkan peningkatan signifikan pada fitofarmaka sistem kardiovaskular. Proporsi belanja kelas terapi ini meningkat dari 36,18% pada tahun 2023 menjadi 63,82% pada tahun 2024. Produk fitofarmaka sistem kardiovaskular yang tersedia selama periode penelitian hanya satu produk, yaitu Tensigard.

Belanja Fitofarmaka pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tabel 4. Proporsi Belanja Obat Fitofarmaka pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia Periode 2023 – 2024

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja 2023 (Rp)	Belanja 2024 (Rp)	Total Belanja (Rp)	Proporsi 2023 (%)	Proporsi 2024 (%)	Perubahan 2023–2024 (%)
Dinas Kesehatan Provinsi	5,609,859,733	8,194,998,738	13,804,858,471	50.64%	55.14%	46.08%
Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kab/Kota	3,489,239,900	3,255,508,330	6,744,748,230	31.50%	21.90%	-6.70%
Instansi Lainnya	1,814,321,332	3,080,211,557	4,894,532,889	16.38%	20.72%	69.77%
Apotek	65,478,900	163,693,054	229,171,954	0.59%	1.10%	149.99%
Puskesmas	67,617,500	87,934,200	155,551,700	0.61%	0.59%	30.05%
Total	31,673,588	80,356,182	112,029,770	0.29%	0.54%	153.70%
Total	11,078,190,953	14,862,702,061	25,940,893,014	100%	100%	34.16%

Berdasarkan Tabel 4, total belanja fitofarmaka pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia periode 2023–2024 meningkat sebesar Rp2,8 miliar atau 34,16%. Dinas Kesehatan Provinsi menjadi penyumbang belanja terbesar sebesar Rp13,8 miliar dengan peningkatan Rp2,6 miliar (46,08%). Rumah sakit mencatat total belanja Rp6,7 miliar, namun secara proporsi mengalami penurunan sebesar 6,70% dari tahun 2023 ke 2024. Sementara itu, belanja di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meningkat sebesar Rp1,3 miliar (67,77%). Belanja terendah tercatat pada Puskesmas, apotek, dan instansi lainnya.

PEMBAHASAN

Peningkatan belanja obat fitofarmaka pada periode 2023–2024 menunjukkan adanya respons terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, khususnya melalui Formularium Fitofarmaka Kementerian Kesehatan dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 [14]. Kebijakan tersebut berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan visibilitas fitofarmaka dalam sistem pengadaan nasional melalui e-Katalog.

Dominasi produk Stimuno dalam pertumbuhan belanja mencerminkan bahwa fitofarmaka dengan indikasi imunomodulator memiliki tingkat penerimaan yang lebih baik dibandingkan produk lain. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya peningkatan konsumsi obat herbal di masyarakat, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal [21]. BPOM mencatat hingga Maret 2025 hanya terdapat 20 produk fitofarmaka yang terdaftar, dengan dominasi pasar oleh beberapa produk tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan fitofarmaka masih terkonsentrasi pada produk-produk tertentu dan belum merata [23].

Ketimpangan pemanfaatan fitofarmaka berdasarkan kelas terapi menunjukkan bahwa produk untuk penyakit kronis, seperti hipertensi dan diabetes, masih belum banyak digunakan. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya penerimaan tenaga medis terhadap fitofarmaka sebagai terapi alternatif atau komplementer, serta belum terintegrasinya fitofarmaka ke dalam Formularium Nasional JKN [6]. Padahal, fitofarmaka yang telah teruji secara klinis berpotensi mendukung kemandirian farmasi nasional dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat yang saat ini mencapai lebih dari 90% [2].

Peningkatan belanja fitofarmaka pada kelas terapi sistem kardiovaskular, khususnya Tensigard, menunjukkan adanya peluang pemanfaatan fitofarmaka dalam pengelolaan penyakit kronis. Meskipun masih berperan sebagai terapi pendukung, tren peningkatan ini mengindikasikan mulai tumbuhnya kepercayaan terhadap fitofarmaka dalam praktik pelayanan kesehatan [7], [8].

Distribusi belanja fitofarmaka yang bergeser dari rumah sakit ke fasilitas pelayanan primer, seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas, menunjukkan adanya respons terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan terkait penggunaan sediaan farmasi berbahan baku produksi dalam negeri (Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/1333/2023). Selain itu, peningkatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kesehatan pada tahun 2024 turut berkontribusi dalam mendorong pemanfaatan fitofarmaka di tingkat daerah [12], [14].

Tabel 5. Analisis SWOT Fitofarmaka

	Kekuatan (<i>strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
Internal Environment	1. Potensi Bahan baku lokal tumbuhan obat berlimpah	1. Biaya riset dan uji klinis masih tinggi
	2. Dukungan regulasi untuk percepatan dan hilirisasi	2. Mutu bahan baku belum stabil
	3. Fasilitas untuk memastikan kualitas bahan baku obat tradisional P4TO dan PED	3. Harga produk belum kompetitif dibanding obat modern
	4. Pengalokasian anggaran dana BOK, Kapitasi JKN dan DAK Fisik untuk penyediaan obat	4. Belum terintegrasi dalam JKN
	5. Pemanfaatan e-katalog Sektoral	5. Rendahnya minat industry memproduksi fitofarmaka
		6. <i>Acceptability</i> profesi medis dalam penggunaan fitofarmaka
		7. Promosi yang kurang

	Peluang (<i>opportunity</i>)	Ancaman (<i>threat</i>).
External Environment	1. Pemerintah membuka Kerjasama internasional bidang Kesehatan dan teknologi (change source)	1. Peredaran produk OT ilegal tanpa izin dan OT-BKO
	2. Jumlah industri obat tradisional yang banyak	2. Masuknya produk obat tradisional impor yang kompetitif di pasar Indonesia
	3. Penelitian ilmiah untuk membuktikan efek terapi tumbuhan obat semakin banyak	3. Rendahnya kepercayaan Sebagian Masyarakat dan tenaga Kesehatan terhadap evektifitas fitofarmaka
	4. Pemanfaatan Upaya Kesehatan Tradisional	
	5. Upaya Hilirisasi riset Fitofarmaka oleh pemerintah semakin aktif	

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa penguatan daya saing fitofarmaka memerlukan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah, industri, peneliti, dan tenaga kesehatan. Integrasi fitofarmaka ke dalam JKN, penurunan biaya riset melalui kolaborasi, optimalisasi e-Katalog, serta penguatan promosi dan edukasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemanfaatan dan keberlanjutan fitofarmaka di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, fitofarmaka berpotensi menjadi pilar penting dalam transformasi sistem kesehatan nasional yang mandiri dan berkelanjutan.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa industri fitofarmaka di Indonesia cukup menunjukkan tren positif dalam pemanfaatannya, belanja obat fitofarmaka di Indonesia selama periode 2023–2024 mencapai Rp25,94 miliar, dengan peningkatan proporsi belanja sebesar 25,46% dari 11,1 Milyar Rupiah pada tahun 2023 menjadi 14,9 Milyar Rupiah pada tahun 2024. Total belanja Fitofarmaka memang belum terlalu besar dan relative masih sangat kecil hanya sekitar 0,10% jika dibandingkan dengan total belanja obat modern berdasarkan data LKPP pada periode yang sama yaitu sebesar 27,3 Triliun Rupiah, walau terjadi tren positif dalam belanja obat Fitofarmaka tetapi pemanfaatannya belum maksimal.

Dominasi belanja terlihat pada wilayah Jawa yaitu Provinsi Jawa Tengah 3,88 Milyar Rupiah, Provinsi Jawa Barat 3,02 Milyar Rupiah, Provinsi Jawa Timur 2,38 Milyar Rupiah, hal ini didukung oleh populasi yang besar, infrastruktur kesehatan yang memadai, dan preferensi budaya terhadap pengobatan herbal yang menunjukkan kecenderungan masyarakat di wilayah tersebut untuk lebih banyak memanfaatkan obat tradisional berbasis fitofarmaka. Sedangkan untuk wilayah timur Indonesia masih terkendala infrastruktur distribusi dan kapasitas industri produksi lokal fitofarmaka masih terbatas, sehingga dibutuhkan pemerataan dan penguatan jaringan distribusi lintas propinsi dan dukungan kebijakan daerah untuk memperluas keberadaan fasilitas industri obat tradisional dan meningkatkan pembelanjaan fitofarmaka daerah

Produk fitofarmaka yang berfungsi sebagai penambah nutrisi seperti VipAlbumin Plus dan produk imunomodulator, seperti Stimuno Syrup dan Stimuno Forte Cap, mendominasi pasar berdasarkan value dan volume, sementara produk untuk penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes masih memiliki pangsa pasar yang lebih kecil. Perkembangan produk fitofarmaka sejak tahun 2005 sampai 2022 jumlahnya masih sangat sedikit hal ini menunjukkan keengganan dari industri untuk memproduksi fitofarmaka^[23] karena keterbatasan regulasi yang jelas yaitu masih belum adanya jaminan pasar untuk produk fitofarmaka dan belum adanya integrasi dalam JKN karena obat fitofarmaka belum masuk ke dalam Formularium Nasional, sulitnya riset karena membutuhkan waktu, tahapan yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit serta masih kurangnya promosi untuk produk baru, menyebabkan sampai saat ini baru 5 Industri Obat Tradisional yang berminat untuk mengembangkan dan memproduksi fitofarmaka dalam negeri dengan jumlah obat fitofarmaka yang telah di produksi dan mendapatkan izin edar BPOM sebanyak 20 produk^[1].

Total belanja obat fitofarmaka tahun 2024 pada pelayanan primer mengalami peningkatan yaitu pada Dinas Kesehatan Provinsi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,6 milyar rupiah (46,08%), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan sebesar 1.3 milyar rupiah (69,77%) dan Puskesmas meningkat sebesar 229.17 Juta Rupiah (153,70%) dibandingkan tahun 2023, ini menunjukkan adanya respon terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui katalog elektronik

harus mengutamakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri, dengan nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 52% untuk obat dan obat tradisional hal ini juga ditandai dengan adanya peningkatan realisasi pemanfaatan Dana DAK fisik di tahun 2024 sebesar 87,13% ^[14].

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyediaan data serta pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pemanfaatan obat fitofarmaka di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). *Data pendaftaran fitofarmaka hingga September 2024*. Jakarta: BPOM.
- [2] Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2019). *Analisis Ketergantungan Indonesia Terhadap Impor Bahan Baku Obat*. Jakarta: BPOM
- [3] Fitriana, N. S. R. (2020). *Penggunaan Obat Herbal di Masyarakat Jawa: Studi Etnofarmakologi*. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 12(2), 45–60.
- [4] Herlina, L., Utami, D., & Rahmadani, T. (2022). *Pemetaan potensi dan persebaran fitofarmaka di Indonesia*. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 12(2), 121–137.
- [5] Kebijakan Pembangunan, B., Kementerian, K., & Ri, K. (2023). *SURVEY KESEHATAN INDONESIA (SKI) DALAM ANGKA*.
- [6] kementerian kesehatan. (2024). *LAPORAN KINERJA DIREKTORAT KETAHANAN FARMASI DAN ALKES TAHUN 2024*.
- [7] Rifana S, R. (2005). *STRATEGI BERSAING FITOFARMAKA MENGHADAPI OBAT MODERN*. Tesis : Universitas Indonesia (2005)
- [8] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), *Buku Formularium Fitofarmaka*, Jakarta : Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI.
- [9] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024), *Laporan Kinerja Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2024*. Jakarta : Kemenkes RI
- [10] Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- [11] Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- [12] Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024*.
- [13] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- [14] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia 2024*. Jakarta: Kemenkes RI.
- [15] Kementerian Kesehatan RI, 2018. *Laporan Nasional RISKESDAS 2018*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- [16] Portal satu data BPOM : <https://satudata.pom.go.id/datasets/29-jumlah-produk-obat-tradisional-berdasarkan-kategori?lang=id&tabs=tabs2>

- [17] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 *tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*, Jakarta : 2014
- [18] Rachmawati, I., Prabowo, S., & Wibisono, A. (2021). *Potensi dan tantangan pengembangan fitofarmaka di Indonesia*. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,31(4),201–214.
- [19] Survei Kesehatan Indonesia. (2023). Laporan pemanfaatan upaya kesehatan tradisional. Jakarta: Kemenkes RI.
- [20] Suharyanto, B. (2020). Distribusi dan aksesibilitas obat tradisional berbasis tanaman obat di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 10(1), 45–57.
- [21] Yuliana, E., & Handoko, T. (2019). Fitofarmaka sebagai pilar ketahanan kesehatan nasional. *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 5(2), 87–99.
- [22] Fred, R. David., Forest, R. David (2017). *Manajemen Strategik : Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Penerbit Salemba Empat, Edisi 15, Cetakan kedua (2017)
- [23] Sembiring, E.N., & Damayanti, S. (2023), Pendampingan Uji Klinik Obat Bahan Alam Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Hilirisasi Penelitian Menjadi Fitofarmaka, *Jurnal Inovasi Ilmu Kesehatan*, Vol.2(4).